



# WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

## PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 38 TAHUN 2012

### TENTANG

#### KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI DAERAH/HONOR DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, maka kepada PNS Daerah dan Pegawai Daerah perlu diberi Tambahan Penghasilan;
  - bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang kriterianya ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah;
  - bahwa dalam rangka untuk memberikan rasa keadilan terhadap Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diberikan juga kepada Pegawai Daerah/Honor di lingkup Pemerintah Kota Padang;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kriteria dan Besaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Daerah/Honor di lingkup Pemerintah Kota Padang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 13, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Lembaran Daerah Tahun 2012, Nomor 13) (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Lembaran Daerah Tahun 2012, Nomor 14) (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15) (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 17);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI DAERAH/HONOR DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA PADANG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Padang dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah;
3. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Padang yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang dan bekerja pada Pemerintah Kota Padang atau atau dipekerjakan di luar Pemerintah Kota Padang;
4. Pegawai Daerah atau Pegawai Honor yang selanjutnya disebut Pegawai Daerah adalah Pegawai Daerah yang Surat Keputusan pengangkatannya ditandatangani oleh Walikota atau Sekretaris Daerah;
5. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PPT adalah Dokter non PNSD pada Dinas Kesehatan
6. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada PNSD dan Pegawai Daerah/honor diluar gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat kepala SKPD adalah kepala satuan organisasi perangkat daerah pada Pemerintah daerah kota padang selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Kepala unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah adalah kepala bagian pada Sekretariat Daerah Kota Padang.

### **BAB II KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Pasal 2**

Kepada PNSD dan Pegawai Daerah di lingkup Pemerintah Kota Padang diberikan tambahan penghasilan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
- b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
- c. Tambahan penghasilan berdasarkan Tempat bertugas;
- d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
- e. Tambahan penghasilan berdasarkan kinerja; dan
- f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

### **Pasal 3**

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal, yang terdiri atas :

- a. TPP beban kerja bagi pejabat struktural dan fungsional, kecuali fungsional guru.
- b. TPP Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) SKPD.
- c. TPP Pengawas/Pelugas Kebersihan Non PNSD pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

### **Pasal 4**

Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada PNSD dan Pegawai Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil, yaitu :

- a. PNSD dan Pegawai Daerah pada Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
- b. PNSD dan Pegawai Daerah pada Kelurahan Sungai Pisang Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
- c. PNSD dan PTT Dinas Kesehatan pada Puskesmas Pembantu Kelurahan Air Manis Kecamatan Padang Selatan.
- d. PNSD dan PTT Dinas Kesehatan pada Puskesmas Pembantu Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan.
- e. PNSD dan PTT Dinas Kesehatan pada Puskesmas Pembantu Kelurahan Baringin Kecamatan Lubuk Kilangan.
- f. PNSD dan PTT Dinas Kesehatan pada Puskesmas Pembantu Kelurahan Batu Busuk Kecamatan Pauh.

### **Pasal 5**

Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan kepada PNSD dan Pegawai Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi, yaitu :

- a. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran.
- b. Satuan Polisi Pamong Praja, kecuali fungsional umum administratif.

### **Pasal 6**

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka, yaitu Dokter spesialis pada RSUD dr. Rasidin.

### **Pasal 7**

Tambahan penghasilan berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.

### **Pasal 8**

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaitu diberikan kepada semua Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, dalam bentuk tunjangan kesejahteraan pegawai.

**BAB III**  
**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

**Pasal 9**

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diatur dengan peraturan walikota tentang pedoman standar biaya dokumen pelaksana anggaran.
- (3) Besaran Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per orang per bulan.
- (4) Besaran Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.
- (5) Besaran Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.
- (6) Besaran Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) per orang perbulan.
- (7) Besaran Tambahan penghasilan berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Besaran Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang pertahun dan dibayarkan 1 kali pembayaran.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PEMBAYARAN**  
**Pasal 10**

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dibayar pada:

- a. PNSD yang Pindah tugas atau berstatus titipan ke luar Pemerintah Kota Padang dihitung mulai tanggal berlakunya Surat Keputusan pindah/titipan PNSD yang bersangkutan;
- b. PNSD yang pindah ke Pemerintah Kota Padang jika kepindahan yang bersangkutan dalam Tahun Anggaran berjalan;
- c. PNSD yang sedang melaksanakan tugas belajar.
- d. Pegawai outsourcing.

**Pasal 11**

- (1) Dalam rangka peningkatan disiplin pegawai dilingkup Pemerintah Kota Padang, Kepala SKPD dan Kepala Unit Kerja pada sekretariat daerah berwenang melakukan pemotongan terhadap pembayaran TPP Beban kerja sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a terhadap pegawai yang melanggar jam kerja.
- (2) Pegawai dinyatakan melanggar jam kerja apabila tidak masuk kantor, keluar kantor/tidak berada di kantor, terlambat masuk kerja, pulang sebelum waktunya dan/atau tidak mengisi daftar hadir tanpa alasan yang sah.
- (3) Tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat keterangan dari atasan langsung pegawai tersebut sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.
- (4) Pegawai tidak dinyatakan melanggar jam kerja apabila tidak masuk kantor, terlambat masuk kerja, pulang sebelum waktunya dan/atau tidak mengisi daftar hadir dengan menggunakan alasan yang sah.

- (5) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan yang disetujui oleh :
- Sekretaris Daerah, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh kepala satuan perangkat daerah.
  - Pejabat eselon II.b, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat eselon III dan kepala UPT dilingkungan masing-masing
  - Pejabat eselon III, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat eselon IV dan fungsional dilingkungan masing-masing.
  - Pejabat eselon IV, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat fungsional dilingkungan masing-masing.
- (6) Surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

#### Pasal 12

- (1) Pemotongan TPP Beban kerja diberlakukan kepada :
- Pegawai yang tidak masuk bekerja atau tidak berada di tempat tugas selama  $7 \frac{1}{2}$  (tujuh setengah) jam atau lebih dalam sehari;
  - Pegawai yang keluar/tidak berada dikantor;
  - Pegawai yang terlambat masuk kantor;
  - Pegawai yang pulang sebelum waktunya; dan/atau
  - Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir.
- (2) Pemotongan TPP Beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan dalam % (persentase) (perseratus)
- (3) Kepada pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diberlakukan pemotongan TPP Beban Kerja sebesar 5 % (lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja atau tidak berada di tempat tugas selama  $7 \frac{1}{2}$  (tujuh setengah) jam atau lebih dalam sehari.
- (4) Kepada pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diberlakukan pemotongan TPP Beban Kerja sebesar 0,5% untuk pegawai yang keluar/tidak berada dikantor selama 0 s/d 30 menit dan 1% untuk pegawai yang keluar/tidak berada dikantor selama 31 s/d 60 menit, dan berlaku kelipatannya.
- (5) Kepada pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan huruf e diberlakukan pemotongan TPP Beban Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran VI peraturan walikota ini.
- (6) Kepada pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dan huruf e diberlakukan pemotongan TPP Beban Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran VII peraturan walikota ini.

#### Pasal 13

Pemotongan TPP beban Kerja sebagaimana dimaksud pasal 11 dan pasal 12 diatas, dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) hari paling banyak 5% (lima perseratus) dan 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus)

#### Pasal 14

- Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, b, c, dan d dibayarkan pada awal bulan berikutnya.
- Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dibayarkan sekaligus 1 (satu) kali dalam setahun.

**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 15**

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Dan Pegawai Daerah/Honor di Lingkungan Pemerintah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 28 DESEMBER 2012

**WALIKOTA PADANG**

  
**FAUZI BAHAR**

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 28 DESEMBER 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

  
**SYAFRIL BASYIR**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 38**

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA PADANG**

**I. JABATAN STRUKTURAL**

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
<b>1</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>		
	Sekretaris Daerah	17	7.500.000
	- Asisten Pemerintahan	16	6.000.000
	- Kabag Pemerintahan	12	2.500.000
	- Kasubbag Administrasi Pemerintahan	9	750.000
	- Kasubbag Pembinaan Wilayah	9	750.000
	- Kasubbag Otonomi Daerah	9	750.000
	- Kabag Hukum	12	2.500.000
	- Kasubbag Perundang-Undangan	9	750.000
	- Kasubbag Bantuan Hukum	9	750.000
	- Kasubbag Dokumentasi Hukum	9	750.000
	- Kabag Pertanahan	12	2.500.000
	- Kasubbag Administrasi Pertanahan	9	750.000
	- Kasubbag Ganti Rugi Tanah	9	750.000
	- Kasubbag Penyelesaian Masalah Pertanahan	9	750.000
	- Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesra	16	6.000.000
	- Kabag Perekonomian	12	2.500.000
	- Kasubbag Bina Produksi Daerah	9	750.000
	- Kasubbag Bina Sarana dan Prasarana Perekonomian	9	750.000
	- Kasubbag Ketahanan Ekonomi Daerah	9	750.000
	- Kabag Pembangunan	12	2.500.000
	- Kasubbag Pembinaan Administrasi Pembangunan	9	750.000
	- Kasubbag Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan	9	750.000
	- Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	9	750.000
	- Kabag Kesra	12	2.500.000
	- Kasubbag Bina Mental dan Kegamaan	9	750.000
	- Kasubbag Bina Kesejahteraan Rakyat	9	750.000
	- Kasubbag Bina Pendidikan dan Kebudayaan	9	750.000
	- Asisten Administrasi	16	6.000.000
	- Kabag Organisasi	12	2.500.000
	- Kasubbag Analisa Jabatan	9	750.000
	- Kasubbag Ketatalaksanaan	9	750.000
	- Kasubbag Kelembagaan	9	750.000
	- Kabag Humas	12	2.500.000
	- Kasubbag Publikasi	9	750.000
	- Kasubbag Dokumentasi dan Koordinasi Kehumasan	9	750.000
	- Kasubbag Protokol	9	750.000
	- Kabag Umum	12	2.500.000
	- Kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Sandi, dan Telekomunikasi	9	750.000
	- Kasubbag Keuangan	9	750.000
	- Kasubbag Rumah Tangga	9	750.000
	- Staf Ahli	13	3.000.000



No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
<b>2</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>		
	Sekretaris DPRD	14	3.500.000
	- Kepala Bagian Administrasi	11	1.500.000
	- Kasubbag Perlengkapan	9	750.000
	- Kasubbag Umum	9	750.000
	- Kabag Persidangan dan Risalah	11	1.500.000
	- Kasubbag Persidangan	9	750.000
	- Kasubbag Risalah	9	750.000
	- Kasubbag Hukum dan Perundang-undangan	9	750.000
	- Kepala Bagian Keuangan	11	1.500.000
	- Kasubbag Anggaran	9	750.000
	- Kasubbag Verifikasi	9	750.000
	- Kepala Bagian Humas dan Protokol	11	1.600.000
	- Kasubbag Humas dan Dokumentasi	9	750.000
	- Kasubbag Protokol dan Pengaduan	9	750.000
<b>3</b>	<b>INSPEKTORAT</b>		
	Inspektur	16	6.000.000
	- Sekretaris	11	1.500.000
	- Kasubbag Umum	9	900.000
	- Kasubbag Keuangan	9	900.000
	- Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	9	900.000
	Inspektur Pembantu I	11	1.500.000
	- Inspektur Pembantu II	11	1.500.000
	- Inspektur Pembantu III	11	1.500.000
	- Inspektur Pembantu IV	11	1.500.000
<b>4</b>	<b>BAPPEDA</b>		
	Kepala Bappeda	15	5.000.000
	- Sekretaris	11	1.500.000
	- Kasubbag Penyusunan Program	9	750.000
	- Kasubbag Umum	9	750.000
	- Kasubbag Keuangan	9	750.000
	- Kabid Ekonomi	10	1.250.000
	- Kasubbid Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9	750.000
	- Kasubbid Perdagangan dan Kerjasama	9	750.000
	- Kabid Sosial dan Budaya	10	1.250.000
	- Kasubbid Pendidikan Kesehatan dan Budaya	9	750.000
	- Kasubbid Sosial Kependudukan dan Kemasyarakatan	9	750.000
	- Kabid Fisik dan Prasarana	10	1.250.000
	- Kasubbid Prasarana, sarana dan utilitas	9	750.000
	- Kasubbid Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	9	750.000
	- Kabid Litbang dan Statistik	10	1.250.000
	- Kasubbid Penelitian dan Pembangunan	9	750.000
	- Kasubbid Data dan Pelaporan	9	750.000
	- Kabid Pengembangan Wilayah	10	1.250.000
	- Kasubbid Tata Ruang	9	750.000
	- Kasubbid Perumahan dan Permukiman	9	750.000
<b>5</b>	<b>Badan Pengendalian Dampak Lingkungan</b>		
	Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	14	3.500.000

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
	- Sekretaris	11	1.500.000
	- Kasubbag Umum	9	750.000
	- Kasubbag Keuangan	9	750.000
	- Kepala Bidang Penataan Lingkungan	10	1.250.000
	- Kasubbid Peraturan Perundang - Undangan	9	750.000
	- Kasubbid Penegakan Hukum	9	750.000
	- Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan	10	1.250.000
	- Kasubbid Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air, Tanah & Udara	9	750.000
	- Kasubbid Pengawasan & Pengendalian Lingkungan Industri dan Permukiman	9	750.000
	- Kabid Pengkajian Dampak Lingkungan	10	1.250.000
	- Kasubbid Kajian Amdal dan UKL/UPL	9	750.000
	- Kasubbid Tata dan Bina Lingkungan	9	750.000
	- Kabid Pengembangan Komunikasi dan Kelembagaan Lingkungan	10	1.250.000
	- Kasubbid Pengembangan Komunikasi Lingkungan	9	750.000
	- Kasubbid Pengembangan Kelembagaan Lingkungan	9	750.000
	- Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup	9	750.000
	- Kasubbag Tata Usaha Laboratorium	8	600.000
<b>6</b>	<b>BPMPKB</b>		
	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	14	3.500.000
	- Sekretaris	11	1.500.000
	- Kasubbag Umum	9	750.000
	- Kasubbag Keuangan	9	750.000
	- Kasubbag Kepegawaian	9	750.000
	- Kabid Data dan Informasi	10	1.250.000
	- Kasubbid Pengumpulan & Pengolahan Data	9	750.000
	- Kasubbid Evaluasi Program dan Penyebarluasan Informasi	9	750.000
	- Kabid Ketahanan Ekonomi Masyarakat	10	1.250.000
	- Kasubbid Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	9	750.000
	- Kasubbid Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat	9	750.000
	- Kabid Penanggulangan Kemiskinan	10	1.250.000
	- Kasubbid Perencanaan dan Analisa Program	9	750.000
	- Kasubbid Koordinasi dan Pengembangan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan	9	750.000
	- Kabid Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Adat, Sosial Budaya, dan Masyarakat	10	1.250.000
	- Kasubbid Pengembangan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	9	750.000
	- Kasubbid Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	9	750.000
	- Kabid Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan	10	1.250.000
	- Kasubbid Pemberdayaan Organisasi dan Peran Aktif Perempuan	9	750.000
	- Kasubbid Advokasi, Fasilitas, Perlindungan Perempuan dan Anak	9	750.000
	- Kabid Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	10	1.250.000
	- Kasubbid Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	9	750.000
	- Kasubbid Penguatan Keluarga Kecil Berkualitas	9	750.000
	- Kepala UPTD Kecamatan	9	750.000
	- Kasubbag Tata Usaha	8	600.000
<b>7</b>	<b>BKD</b>		
	Kepala BKD	14	3.500.000
	- Sekretaris	11	1.500.000
	- Kasubbag Umum	9	750.000

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
	- Kasubbag Keuangan	9	750.000
	- Kabid Perencanaan & Pengolahan Data	10	1.250.000
	- Kepala Sub Bidang Formasi & Pengadaan Pegawai	9	750.000
	- Kepala Sub Bidang Pengolah Data dan Informasi Kepegawaian	9	750.000
	- Kepala Bidang Mutasi, Pangkat dan Pensiun	10	1.250.000
	- Kepala Sub Bidang Mutasi	9	750.000
	- Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun	9	750.000
	- Kepala Bidang Diklat dan Pengembangan	10	1.250.000
	- Kepala Sub Bidang Diklat Struktural dan Pengembangan	9	750.000
	- Kepala Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional	9	750.000
	- Kepala Bidang Pengendalian	10	1.250.000
	- Kepala Sub Bidang Monitoring dan Peningkatan Disiplin	9	750.000
	- Kepala Sub Bidang Peraturan dan Kesejahteraan	9	750.000
<b>8</b>	<b>BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU</b>		
	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	14	3.500.000
	- Sekretaris	11	1.500.000
	- Kasubbag. Umum	9	750.000
	- Kasubbag Keuangan	9	750.000
	- Kasubbag. Perencanaan dan Evaluasi	9	750.000
	- Kabid Potensi dan Promosi Penanaman Modal	10	1.250.000
	- Kasubid Analisa Potensi dan Penanaman Modal	9	750.000
	- Kasubid Promosi dan Pengembangan	9	750.000
	- Kabid Kerjasama Antar Lembaga Penanaman Modal	10	1.250.000
	- Kasubid Fasilitasi Kemitraan Dunia Usaha	9	750.000
	- Kasubid Kerjasama	9	750.000
	- Kabid Pelayanan Perijinan Terpadu	10	1.250.000
	- Kasubid Pelayanan Perijinan	9	750.000
	- Kasubid Pelayanan Non Perijinan	9	750.000
	- Kabid Pengawasan dan Pengendalian	10	1.250.000
	- Kasubid Pembinaan	9	750.000
	- Kasubid Pengawasan dan Evaluasi	9	750.000
<b>9</b>	<b>KANTOR KESBANGPOL</b>		
	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa	12	2.500.000
	- Sub Bagian Tata Usaha	9	750.000
	- Kasi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	9	750.000
	- Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional	9	750.000
	- Kasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat, dan Ekonomi	9	750.000
<b>10</b>	<b>KANTOR KETAHANAN PANGAN</b>		
	Kepala Kantor Ketahanan Pangan	12	2.500.000
	- Kasubbag Tata Usaha	9	750.000
	- Kasi Ketersediaan Pangan	9	750.000
	- Kasi Distribusi dan Harga Pangan	9	750.000
	- Kasi Kewaspadaan dan Pola Konsumsi Pangan	9	750.000
<b>11</b>	<b>KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN, DAN DOKUMENTASI</b>		
	Kepala Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi	12	2.500.000
	- Kasubbag Tata Usaha	9	750.000
	- Kepala Seksi Perpustakaan	9	750.000

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
	- Kepala Seksi Pembinaan	9	750.000
	- Kepala Seksi Arsip dan Dokumentasi	9	750.000
<b>12</b>	<b>RSUD</b>		
	Direktur RSUD	12	2.500.000
	- Kabag Tata Usaha	10	1.250.000
	- Kasubbag Umum	9	750.000
	- Kasubbag Kepegawaian	9	750.000
	- Kasubbag Program	9	750.000
	- Kabid Keuangan dan Aset	10	1.250.000
	- Kasi Keuangan	9	750.000
	- Kasi Aset	9	750.000
	- Kabid Pelayanan Medis dan Penunjang Medis	10	1.250.000
	- Kasi Pelayanan Medis	9	750.000
	- Kasi Penunjang Medis	9	750.000
	- Kabid Keperawatan	10	1.250.000
	- Kasi Asuhan Keperawatan	9	750.000
	- Kasi Etika Keperawatan dan SDM	9	750.000
<b>13</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>		
	Kepala Dinas Pendidikan	14	3.500.000
	- Sekretaris	11	1.500.000
	- Kasubbag Umum dan Kepegawaian	9	750.000
	- Kasubbag Keuangan	9	750.000
	- Kasubbag Program	9	750.000
	- Kabid Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal (PAUDNI)	10	1.250.000
	- Kasi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	9	750.000
	- Kasi Pembinaan Kursus dan Pelatihan	9	750.000
	- Kasi Pembinaan Pendidikan Masyarakat	9	750.000
	- Kabid Pendidikan Dasar	10	1.250.000
	- Kasi Kurikulum SD	9	750.000
	- Kasi Kurikulum SMP	9	750.000
	- Kasi Tenaga Teknis dan Kesiswaan	9	750.000
	- Kepala Bidang Pendidikan Menengah	10	1.250.000
	- Kasi Kurikulum SMA	9	750.000
	- Kasi Kurikulum SMK	9	750.000
	- Kasi Tenaga Teknis dan Kesiswaan	9	750.000
	- Kabid Sarana, Prasarana, dan Aset	10	1.250.000
	- Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	9	750.000
	- Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah	9	750.000
	- Kasi Aset	9	750.000
	Kepala UPTD SD	9	750.000
	- Kasubbag Tata Usaha	8	600.000
	<b>SMP</b>		
	- Kepala Sekolah	0	-
	- Kasubbag Tata Usaha	8	550.000
	<b>SMA</b>		
	- Kepala Sekolah	0	-
	- Kasubbag Tata Usaha	8	550.000
	<b>SMK</b>		
	- Kepala Sekolah	0	-

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
	- Kasubag Tata Usaha	8	550.000
<b>14</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>		
	<b>Kepala Dinas Kesehatan</b>	14	3.500.000
	- Sekretaris	11	1.500.000
	- Kasubbag Umum dan Aset	9	750.000
	- Kasubbag Keuangan	9	750.000
	- Kasubag Kepegawain	9	750.000
	- Kabid Pelayanan Kesehatan	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan Khusus	9	750.000
	- Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak	9	750.000
	- Kepala Seksi Gizi	9	750.000
	- Kabid Pengendalian Masalah Kesehatan	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit	9	750.000
	- Kepala Seksi Wabah dan Bencana	9	750.000
	- Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan	9	750.000
	- Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Perencanaan Pendayagunaan SDM dan Diklat	9	750.000
	- Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat	9	750.000
	- Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi	9	750.000
	- Kabid Jaminan dan Sarana Kesehatan	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Jaminan Kesehatan	9	750.000
	- Kepala Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan	9	750.000
	- Kepala Seksi Kefarmasian	9	750.000
	<b>Kepala UPTD Puskesmas</b>	9	750.000
	- Kasubbag Tata Usaha	8	600.000
<b>15</b>	<b>DISOSNAKER</b>		
	<b>Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja</b>	14	3.500.000
	- Sekretaris	11	1.500.000
	- Kasubbag Umum	9	750.000
	- Kasubbag Keuangan	9	750.000
	- Kabid Pemberdayaan Sosial	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	9	750.000
	- Kasi Pemberdayaan Keluarga Miskin, Komunitas Adat Terpencil, dan Pelestari	9	750.000
	- Kabid Penempatan, Pelatihan, dan Produktifitas	10	1.250.000
	- Kasi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja	9	750.000
	- Kepala Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	9	750.000
	- Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Anak, dan Lanjut Usia	9	750.000
	- Kepala Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Para Cacat, dan NAF	9	750.000
	- Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Penanggulangan Korban Bencana, Tindak Kekerasan, dan Pekerja	9	750.000
	- Kepala Seksi Jaminan Sosial dan Pendayagunaan Sumbangan Sosial	9	750.000
	- Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja	9	750.000
	- Kepala Seksi Pe penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	9	750.000
	- Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan	9	750.000
	- Kepala Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	9	750.000

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
<b>16</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>		
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	3.500.000
	- Sekretaris	11	1.500.000
	- Kasubbag Umum	9	750.000
	- Kasubbag Keuangan	9	750.000
	- Kabid Dinamika Kependudukan	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Pendaftaran dan Mutasi Kependudukan	9	750.000
	- Kepala Seksi Penataan dan Penyebaran Penduduk	9	750.000
	- Kabid Informasi Kependudukan	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Perencanaan Program dan Jaringan SI/IK	9	750.000
	- Kepala Seksi Pengolahan Data, Evaluasi dan Pelaporan	9	750.000
	- Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Kelahiran, Pengakuan, dan Pengesahan Anak	9	750.000
	- Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, dan Kematian	9	750.000
	- Kepala Bidang Pengendalian dan Penyimpanan	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Penyuluhan dan Pengendalian	9	750.000
	- Kepala Seksi Penyimpanan dan Perubahan Akta Catatan Sipil	9	750.000
			-
<b>17</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA</b>		
	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	14	3.600.000
	- Sekretaris	11	1.500.000
	- Kasubbag Umum	9	750.000
	- Kasubbag Keuangan	9	750.000
	- Kasubbag Program dan SDM	9	750.000
	- Kabid Lalu Lintas	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	9	750.000
	- Kepala Seksi Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas	9	750.000
	- Kepala Bidang Angkutan	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Manajemen Angkutan	9	750.000
	- Kepala Seksi Teknik, Sarana, dan Prasarana	9	750.000
	- Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Operasional	9	750.000
	- Kepala Seksi Penegakan Hukum	9	750.000
	- Kepala Bidang Perhubungan Laut	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Pelabuhan	9	750.000
	- Kepala Seksi Pengendalian Lalu Lintas Laut, Keselamatan, dan SAR	9	750.000
	- Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi	9	750.000
	- Kepala Seksi Telematika	9	750.000
	- Kepala UPTD	9	750.000
	- Kasubbag Tata Usaha	8	600.000
<b>18</b>	<b>DINAS PU</b>		
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	14	3.500.000
	- Sekretaris	11	1.500.000
	- Kasubbag Umum	9	750.000
	- Kasubbag Keuangan	9	750.000
	- Kasubbag Kepegawaian	9	750.000
	- Kabid Bina Program	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Perencanaan dan Program	9	750.000
	- Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian	9	750.000

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
	- Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan	9	750.000
	<b>Kepala Bidang Cipta Karya</b>	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Gedung Pemerintah	9	750.000
	- Kepala Seksi Teknik Penyehatan	9	750.000
	- Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan	9	750.000
	<b>Kepala Bidang Bina Marga</b>	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Jalan	9	750.000
	- Kepala Seksi Jembatan	9	750.000
	- Kepala Seksi Peralatan dan Perbekalan	9	750.000
	<b>Kepala Bidang Sumber Daya Air</b>	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Drainase	9	750.000
	- Kepala Seksi Irigasi	9	750.000
	- Kepala Seksi Rawa Pantai, Air Baku, dan Sungai	9	750.000
	<b>Kepala UPTD</b>	9	750.000
	- Kasubbag TU	8	600.000
<b>19</b>	<b>DINAS TATA RUANG, TATA BANGUNAN, DAN PERUMAHAN</b>		
	<b>Kepala Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Perumahan</b>	14	3.500.000
	- <b>Sekretaris</b>	11	1.500.000
	- Kasubbag Umum	9	750.000
	- Kasubbag Keuangan	9	750.000
	- Kasubbag Kepegawaian	9	750.000
	- <b>Kabid Pemetaan</b>	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Survey dan Pengukuran	9	750.000
	- Kepala Seksi Pengolahan Sistem Basis Tata Ruang	9	750.000
	- <b>Kepala Bidang Tata Ruang</b>	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Perencanaan Ruang Kota	9	750.000
	- Kepala Seksi Prasarana dan Perlengkapan Kota	9	750.000
	- <b>Kepala Bidang Tata Bangunan</b>	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Pengarahan Arsitektur dan Konstruksi	9	750.000
	- Kepala Seksi Utilitas dan Kelayakan Bangunan	9	750.000
	- <b>Kepala Bidang Perumahan</b>	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan	9	750.000
	- Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan	9	750.000
	- <b>Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian</b>	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Penyuluhan dan Pembinaan	9	750.000
	- Kepala Seksi Konservasi dan Penataan Lingkungan	9	750.000
	- <b>Kepala UPTD</b>	9	750.000
	- Kasubbag Tata Usaha	8	600.000
<b>20</b>	<b>DINAS KOPERASI DAN UMKM</b>		
	<b>Kepala Dinas Koperasi DAN UMKM</b>	14	3.500.000
	- <b>Sekretaris</b>	11	1.500.000
	- Kasubbag Umum	9	750.000
	- Kasubbag Keuangan	9	750.000
	- <b>Kabid Bina Lembaga</b>	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Kelembagaan Koperasi dan UMKM	9	750.000
	- Kepala Seksi Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan KUKM	9	750.000
	- <b>Kabid Perencanaan</b>	10	1.250.000
	- Kasi Program dan Pendataan	9	750.000
	- Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	9	750.000

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
	- Kepala Bidang Bina Usaha dan Fasilitas Permodalan	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Pengembangan Usaha Koperasi dan UMKM	9	750.000
	- Kepala Seksi Fasilitas Permodalan	9	750.000
	- Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan UMKM	9	750.000
	- Kepala Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi dan UMKM	9	750.000
	- Kepala UPTD	9	750.000
	- Kasubbag Tata Usaha UPTD	8	600.000
<b>21</b>	<b>DINAS PERINDAGTAMBE</b>		
	Kepala Dinas Perindagtamben	14	3.500.000
	- Sekretaris	11	1.500.000
	- Kasubbag Umum	9	750.000
	- Kasubbag Keuangan	9	750.000
	- Kabid Perindustrian	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Bina Usaha Industri	9	750.000
	- Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Industri	9	750.000
	- Kabid Perdagangan	10	1.250.000
	- Kasi Bina Usaha Perdagangan	9	750.000
	- Kepala Seksi Promosi dan Pendaftaran	9	750.000
	- Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan PBJ	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Pembinaan dan Perlindungan Konsumen	9	750.000
	- Kepala Seksi Pengawasan Barang dan Jasa	9	750.000
	- Kepala Bidang Pertambangan dan Energi	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Pertambangan	9	750.000
	- Kepala Seksi Energi	9	750.000
	- Kepala UPTD	9	750.000
	- Kasubbag Tata Usaha UPTD	8	600.000
<b>22</b>	<b>DISPORA</b>		
	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	14	3.500.000
	- Sekretaris	11	1.500.000
	- Kasubbag Umum	9	750.000
	- Kasubbag Keuangan	9	750.000
	- Kabid Kepemudaan	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Peningkatan Kompetensi Pemuda	9	750.000
	- Kepala Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan	9	750.000
	- Kepala Seksi Peningkatan Kreatifitas dan Kewirausahaan Pemuda	9	750.000
	- Kepala Bidang Olahraga	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi	9	750.000
	- Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga	9	750.000
	- Kepala Seksi Industri dan Penerapan IPTEK Olahraga	9	750.000
	- Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan	9	750.000
	- Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga	9	750.000
	- Kepala UPTD	9	750.000
	- Kasubbag Tata Usaha UPTD	8	600.000
<b>23</b>	<b>DPKA</b>		
	Kepala DPKA	15	5.000.000
	- Sekretaris	11	1.500.000



No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
	- Kasubbag Umum dan Kepegawaian	9	1.000.000
	- Kasubbag Keuangan	9	1.000.000
	- Kasubbag Aplikasi Sistem Informasi	9	1.000.000
	- Kepala Bidang Pendapatan	10	1.500.000
	- Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran	9	1.000.000
	- Kepala Seksi Penetapan	9	1.000.000
	- Kepala Seksi Penagihan	9	1.000.000
	- Kabid Pengendalian	10	1.500.000
	- Kepala Seksi Pembinaan Wajib Pajak/Wajib Retribusi	9	1.000.000
	- Kepala Seksi Pengawasan	9	1.000.000
	- Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan	9	1.000.000
	- Kepala Bidang Anggaran	10	1.500.000
	- Kepala Seksi Anggaran Belanja Langsung	9	1.000.000
	- Kepala Seksi Penatausahaan dan Perencanaan Anggaran	9	1.000.000
	- Kepala Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan	9	1.000.000
	- Kepala Bidang Aset	10	1.500.000
	- Kepala Seksi Pengamanan Aset	9	1.000.000
	- Kepala Seksi Penilaian, Penghapusan, dan Pemindahtanganan	9	1.000.000
	- Kepala Seksi Penatausahaan Aset	10	1.500.000
	- Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	9	1.000.000
	- Kepala Seksi Akuntansi	9	1.000.000
	- Kepala Seksi Pelaporan	9	1.000.000
	- Kepala Bidang Perbendaharaan	10	1.500.000
	- Kepala Seksi Penerimaan dan Penatausahaan	9	1.000.000
	- Kepala Seksi Pengeluaran	9	1.000.000
<b>24</b>	<b>DISPERNAKBUNHUT</b>		
	Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan	14	3.500.000
	- Sekretaris	11	1.500.000
	- Kasubbag Umum dan Kepegawaian	9	750.000
	- Kasubbag Keuangan	9	750.000
	- Kasubbag Program	9	750.000
	- Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Tanaman Pangan	9	750.000
	- Kasi Hortikultura	9	750.000
	- Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	9	750.000
	- Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Usaha Peternakan	9	750.000
	- Kepala Seksi Kesehatan Hewan	9	750.000
	- Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner	9	750.000
	- Kabid Kehutanan	10	1.250.000
	- Kasi Peredaran Hasil Hutan	9	750.000
	- Kasi Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam	9	750.000
	- Kasi Inventarisasi Tata Guna Hutan (INTAG)	9	750.000
	- Kabid Perkebunan	10	1.250.000
	- Kasi Produksi	9	750.000
	- Kasi Pengembangan Areal Perkebunan	9	750.000
	- Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	9	750.000
	- Kabid Penyuluhan	10	1.250.000
	- Kasi Kelembagaan dan Metodologi Penyuluhan	9	750.000
	- Kasi Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	750.000

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
	- Kasi Pengembangan Teknologi	9	750.000
	<b>Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian</b>	10	1.250.000
	- Kasi Pengolahan Lahan dan Air	9	750.000
	- Kasi Pupuk, Pestisida, dan Obat-obatan	9	750.000
	- Kasi Kelembagaan dan Alat Mesin Pertanian	9	750.000
	<b>Kepala UPTD</b>	9	750.000
	- Kasubbag Tata Usaha UPTD	8	600.000
<b>25</b>	<b>DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>		
	<b>Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</b>	14	3.500.000
	- <b>Sekretaris</b>	11	1.500.000
	- Kasubbag Umum	9	750.000
	- Kasubbag Keuangan	9	750.000
	<b>Kabid Program dan Pengembangan</b>	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan	9	750.000
	- Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan	9	750.000
	<b>Kabid Seni dan Budaya</b>	10	1.250.000
	- Kasi Pelestarian Budaya	9	750.000
	- Kepala Seksi Pembinaan Seni	9	750.000
	<b>Kepala Bidang Objek dan Sarana Wisata</b>	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata	9	750.000
	- Kepala Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata	9	750.000
	<b>Kepala Bidang Pemasaran</b>	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama	9	750.000
	- Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi	9	750.000
	<b>Kepala UPTD</b>	9	750.000
	- Kasubbag Tata Usaha UPTD	8	600.000
<b>26</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		
	<b>Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan</b>	14	3.500.000
	- <b>Sekretaris</b>	11	1.500.000
	- Kasubbag Umum	9	750.000
	- Kasubbag Keuangan	9	750.000
	- Kasubbag Program	9	750.000
	<b>Kabid Perikanan Tangkap</b>	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	9	750.000
	- Kasi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap	9	750.000
	<b>Kabid Perikanan Budidaya</b>	10	1.250.000
	- Kasi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	9	750.000
	- Kasi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya	9	750.000
	<b>Kabid Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	10	1.250.000
	- Kasi Pengolahan Hasil Perikanan	9	750.000
	- Kasi Pemasaran Hasil Perikanan	9	750.000
	<b>Kabid Pesisir dan Pengawasan Pulau-pulau Kecil</b>	10	1.250.000
	- Kasi Pengelolaan Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil	9	750.000
	- Kasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	9	750.000
	<b>Kepala UPTD</b>	9	750.000
	- Kasubbag Tata Usaha	8	600.000
<b>27</b>	<b>DKP</b>		
	<b>Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan</b>	14	3.500.000

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
	- Sekretaris	11	1.500.000
	- Kasubbag Umum	9	750.000
	- Kasubbag Keuangan	9	750.000
	- Kasubbag Kepegawaian	9	750.000
	- Kabid Kebersihan	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Penyapuan	9	750.000
	- Kepala Seksi Pengangkutan	9	750.000
	- Kepala Bidang Pertamanan,	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Pertamanan dan Ornamen	9	750.000
	- Kepala Seksi Pembibitan dan Penghijauan	9	750.000
	- Kepala Bidang Retribusi	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan	9	750.000
	- Kepala Seksi Penagihan dan Pembukuan	9	750.000
	- Kepala Bidang Program dan Penyuluhan	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Program dan Pengendalian	9	750.000
	- Kepala Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat	9	750.000
	- Kepala UPTD	9	750.000
	- Kasubbag Tata Usaha UPTD	8	600.000
<b>28</b>	<b>DINAS PASAR</b>		
	Kepala Dinas Pasar	14	3.500.000
	- Sekretaris	11	1.500.000
	- Kasubbag Umum	9	750.000
	- Kasubbag Keuangan	9	750.000
	- Kabid Pengembangan Pasar	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi	9	750.000
	- Kepala Seksi Penataan dan Kerjasama	9	750.000
	- Kabid Pendapatan	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Penetapan dan Verifikasi	9	750.000
	- Kepala Seksi Penagihan	9	750.000
	- Kepala Bidang Kebersihan, Keamanan, dan Ketertiban	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	750.000
	- Kepala Seksi Kebersihan	9	750.000
	- Kepala Bidang Pemeliharaan Bangunan	10	1.250.000
	- Kepala Seksi Saluran dan Drainase	9	750.000
	- Kepala Seksi Gedung	9	750.000
	- Kepala UPTD	9	750.000
	- Kasubbag Tata Usaha UPTD	8	600.000
<b>29</b>	<b>BPBD dan PEMADAM KEBAKARAN</b>		
	Kepala Pelaksana BPBD dan Pemadam Kebakaran	14	3.500.000
	- Sekretaris	11	1.500.000
	- Kasubbag Umum	9	750.000
	- Kasubbag Keuangan dan Program	9	750.000
	- Kasubbag Kepegawaian dan Humas	9	750.000
	- Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	10	1.250.000
	- Kasl. Pencegahan	9	750.000
	- Kasl. Kesiapsiagaan	9	750.000
	- Kabid. Kedaruratan dan Logistik	10	1.250.000

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
	- Kasi. Kedaruratan	9	750.000
	- Kasi. Logistik	9	750.000
	- Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	10	1.250.000
	- Kasi. Rehabilitasi	9	750.000
	- Kasi. Rekonstruksi	9	750.000
	- Kabid. Proteksi Kebakaran dan SDM	10	1.250.000
	- Kasi. Proteksi Kebakaran	9	750.000
	- Kasi. SDM dan Diklat	9	750.000
	- Kabid. Pemadam Kebakaran	10	1.250.000
	- Kasi. Sarana dan Prasarana	9	750.000
	- Kasi. Operasional Pemadam Kebakaran	9	750.000
<b>30</b>	<b>SATPOL PP</b>		
	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	12	2.500.000
	- Kepala Bagian Tata Usaha	9	750.000
	- Kasi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	9	750.000
	- Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	9	750.000
	- Kasi Bina Pengembangan Kapasitas	9	750.000
	- Kasi Sarana dan Prasarana	9	750.000
	- Kasi Perlindungan Masyarakat	9	750.000
<b>31</b>	<b>KANTOR KECAMATAN &amp; Kelurahan</b>		
	Camat	12	2.500.000
	- Sekretaris Kecamatan	10	1.250.000
	- Kasubbag Umum	8	600.000
	- Kasubbag Keuangan	8	600.000
	- Kasi Pemerintahan	9	750.000
	- Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	9	750.000
	- Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9	750.000
	- Kasi Kesos dan Penanggulangan Bencana	9	750.000
	- Kasi Perijinan dan Pendapatan	9	750.000
	Lurah	9	750.000
	- Sekretaris Kelurahan	8	600.000
	- Kasi Tata Pemerintahan	8	600.000
	- Kasi Pemberdayaan Masyarakat	8	600.000
	- Kasi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana	8	600.000
	- Kasi Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perijinan	8	600.000
<b>32</b>	<b>SEKRETARIAT KORPRI</b>		
	Sekretaris KORPRI	11	1.500.000
	- Wakil Sekretaris	8	750.000
	- Kasubbag	8	750.000
<b>33</b>	<b>PNS AKTIF PADA INSTITUSI LAIN</b>		
	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum	11	1.500.000
	- Kasubbag	8	750.000

## II. JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN FUNGSIONAL TERTENTU

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
<b>1</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>		
	<b>a. BAGIAN PEMERINTAHAN</b>		
	- Perencana dan Penyusun Program	6	550.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	5	500.000
	- Operator Komputer	4	450.000
	- Pengadministrasi Umum	3	400.000
	- Pengemudi	2	350.000
	- Caraka	2	350.000
	<b>b. BAGIAN HUKUM</b>		
	- Kuasa Hukum Pemko Padang	6	550.000
	- Pengadministrasi dan Pengkoreksi Produk Hukum	6	550.000
	- Perumus Aspek Yuridis Rancangan Produk Hukum	6	550.000
	- Pengkonsep Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	6	550.000
	- Perencana dan Penyusun Program	6	550.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	5	500.000
	- Operator Komputer	4	450.000
	- Pengadministrasi Umum	4	450.000
	- Pengadministrasi Keuangan	4	450.000
	- Pengemudi	2	350.000
	- Caraka	2	350.000
	<b>c. BAGIAN PERTANAHAN</b>		
	- Perencana dan Penyusun Program	6	550.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	5	500.000
	- Operator Komputer	4	450.000
	- Petugas Lapangan	4	450.000
	- Pengadministrasi Umum	3	400.000
	- Pengemudi	2	350.000
	- Caraka	2	350.000
	<b>d. BAGIAN PEREKONOMIAN</b>		
	- Perencana dan Penyusun Program	6	550.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	5	500.000
	- Operator Komputer	4	450.000
	- Pengadministrasi Umum	3	400.000
	- Pengadministrasi Kepegawalan	3	400.000
	- Pengemudi	2	350.000
	- Caraka	2	350.000
	<b>e. BAGIAN PEMBANGUNAN</b>		
	- Perencana dan Penyusun Program	6	550.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	5	500.000
	- Operator Komputer	4	450.000
	- Pengadministrasi Umum	3	400.000
	- Pengemudi	2	350.000
	- Caraka	2	350.000
	<b>f. BAGIAN KESRA</b>		
	- Perencana dan Penyusun Program	6	550.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	5	500.000
	- Operator Komputer	4	450.000
	- Pengadministrasi Umum	3	400.000
	- Pengemudi	2	350.000
	- Caraka	2	350.000

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
	<b>g. BAGIAN ORGANISASI</b>		
	- Analis	8	900.000
	- Perencana dan Penyusun Program	6	550.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	5	500.000
	- Operator Komputer	4	450.000
	- Pengadministrasi Umum	3	400.000
	- Caraka	2	350.000
	- Pengemudi	2	350.000
	<b>h. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL</b>		
	- Perencana dan Penyusun Program	6	550.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	5	500.000
	- Operator Komputer	4	450.000
	- Pengadministrasi Umum	3	400.000
	- Caraka	2	350.000
	- Pengemudi	2	350.000
	- Pramু Acara	2	350.000
	- Protokol	3	400.000
	- Fotografer	3	400.000
	- Kameramen	3	400.000
	- Pengelola Website	4	450.000
	- Teknisi Sound System	4	450.000
	- Petugas Perlengkapan Acara	2	350.000
	<b>i. BAGIAN UMUM</b>		
	- Perencana dan Penyusun Program	6	550.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	5	500.000
	- Operator Komputer	4	450.000
	- Pengadministrasi Umum	3	400.000
	- Caraka	3	400.000
	- Pengemudi (Sopir Sekda/Asisten/Pool)	2	350.000
	- Pengemudi (Sopir Walikota/Wakil Walikota)	4	450.000
	- Ajudan Walikota	5	500.000
	- Ajudan Wakil Walikota	5	500.000
	- Sespri Walikota	6	550.000
	- Sespri Wakil Walikota	5	500.000
	- Sespri Sekteraris Daerah	5	500.000
	- Sespri Asisten	5	500.000
	- Pengadministrasi Umum Sespri	3	400.000
	- Koordinator Kebersihan	2	350.000
	- Teknisi Listrik	4	450.000
	- Teknisi Santel	4	450.000
	- Urusan rumah tangga	2	350.000
	- Protokol	2	350.000
	- urusan pajak	2	350.000
	- Pengadministrasi Keuangan	3	400.000
	<b>2. SEKRETARIAT DPRD</b>		
	- Perencana Program dan Penyusun Laporan	6	550.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	5	500.000
	- Operator Komputer	4	450.000
	- Pengadministrasi Kepegawalan	4	450.000
	- Pengadministrasi Keuangan	4	450.000
	- Pengadministrasi Umum	4	450.000
	- Pengemudi	4	450.000

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
	- Caraka	4	450.000
	- Pramusaji	1	250.000
	- Pramusaji Acara/Protokol	4	450.000
	- Ajudan Ketua DPRD	4	450.000
	- Ajudan Wakil Ketua DPRD	4	450.000
	- Notulen	4	450.000
	- Pendamping Komisi	4	450.000
	- Pendamping Badan Musyawarah	4	450.000
	- Pendamping Badan Anggaran	4	450.000
	- Pendamping Badan Legislasi	4	450.000
	- Pendamping Badan Kehormatan	4	450.000
	- Juru Rekam Sidang	4	450.000
<b>3</b>	<b>INSPEKTORAT</b>		
	- Perencana Program dan Penyusun Laporan	7	650.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	6	650.000
	- Operator Komputer	5	600.000
	- Pengadministrasi Kepegawalan	5	600.000
	- Perencana dan Pengadministrasi Keuangan	6	600.000
	- Pengadministrasi Umum	6	600.000
	- Pengemudi	5	500.000
	- Caraka	5	500.000
	- Pengolah Data TLHP rutin/kasus	6	550.000
	- <b>Fungsional Tertentu</b>		
	- Pengawas Pemerintahan Utama	10	1.500.000
	- Pengawas Pemerintahan Madya	9	900.000
	- Pengawas Pemerintahan Muda	8	800.000
	- Pengawas Pemerintahan Pertama	8	750.000
	- Auditor Ahli Utama	10	1.500.000
	- Auditor Ahli Madya	9	900.000
	- Auditor Ahli Muda	8	800.000
	- Auditor Ahli Penyelia	8	750.000
	- Auditor Ahli Pertama	7	750.000
	- Auditor Pelaksana Lanjutan	6	750.000
<b>4</b>	<b>BAPPEDA</b>		
	- Perencana Program dan Penyusun Laporan	5	500.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	5	500.000
	- Operator Komputer	4	450.000
	- Pengadministrasi Kepegawalan	4	450.000
	- Pengadministrasi Umum	3	400.000
	- Pengemudi	2	350.000
	- Caraka	2	350.000
	- Tenaga Lapangan Suveyor	4	450.000
	- <b>Fungsional Tertentu</b>		
	- Analis Perencana Muda	7	700.000
	- Analis Perencana Pertama	6	600.000
	- Analis Perencana Pertama	5	500.000
<b>5</b>	<b>Badan Pengendalian Dampak Lingkungan</b>		
	- Perencana Program dan Penyusun Laporan	5	500.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	4	450.000
	- Operator Komputer	3	400.000
	- Pengadministrasi Kepegawalan	3	400.000

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
	- Pengadministrasi Keuangan	3	400.000
	- Pengadministrasi Umum	3	400.000
	- Pengemudi	3	400.000
	- Caraka	2	350.000
	- Pembuat Perpu	5	500.000
	- Penegak Hukum Lingkungan	5	500.000
	- Penyusun dan Pengolah Data	4	450.000
	- Pembina Lingkungan	4	450.000
	- Pengawas Pemulihan Lingkungan	4	450.000
	- Pengawas dan Koordinator Pengaduan	4	450.000
	- Pelaksanaan Pengendalian Teknis AMDAL	4	450.000
	- Perencana dan Penyusun Laporan	4	450.000
	- <b>Fungsional Tertentu</b>		-
	- Penyuluh Lingkungan Hidup	6	550.000
	- Pranata Laboratorium	6	550.000
	- Petugas Pengambil Contoh Uji	5	500.000
<b>6</b>	<b>BPMPKB</b>		
	- Perencana Program dan Penyusun Laporan	5	500.000
	- Fasilitator / Advokasi Perlindungan Perempuan dan Anak	4	450.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	4	450.000
	- Operator Komputer	3	400.000
	- Pengadministrasi Kepegawalan	2	350.000
	- Pengadministrasi Keuangan	2	350.000
	- Pengadministrasi Umum	2	350.000
	- Pengemudi	1	250.000
	- Caraka	1	250.000
	- Pembina Usaha Ekonomi Masyarakat	5	500.000
	- Pembina dan Pengarah SDM dan TTG	5	500.000
	- Pembina dan Pengarah SPMN	5	500.000
	- Pembina dan Pengarah Kredit Mikro	5	500.000
	- Fasilitator P2KP	5	500.000
	- Fasilitator TKPK	5	500.000
	- Fasilitator PNPM	5	500.000
	- <b>Jabatan Fungsional Tertentu</b>		-
	- Penyuluh KB	5	500.000
<b>7</b>	<b>BKD</b>		
	- Perencana Program dan Penyusun Laporan	5	500.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data (SK Kenaikan Pangkat)	4	450.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data (Diklat Teknis, Fungsional, Ijin Belajar)	4	450.000
	- Operator Komputer / SIMPEG	3	400.000
	- Pengadministrasi Kepegawaian (Pengelola SK Kenaikan Pangkat)	3	400.000
	- Pengadministrasi Kepegawaian (Pemroses Pensiun)	3	400.000
	- Pengadministrasi Kepegawaian (Pemroses Karis dan Karsu)	3	400.000
	- Pengadministrasi Kepegawaian (Pemroses Karpeg, Taspem, Pengadaan)	3	400.000
	- Pengadministrasi Keuangan (Bendahara, dll)	3	400.000
	- Pengadministrasi Umum	3	400.000
	- Pengemudi	2	350.000
	- Caraka	1	250.000
	- Agendaris	2	350.000
<b>8</b>	<b>BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU</b>		
	- Perencana Program dan Penyusun Laporan	5	500.000



No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
	- Pengumpul dan Pengolah Data	4	450.000
	- Operator Komputer	3	400.000
	- Pengadministrasi Kepegawaian	3	400.000
	- Pengadministrasi Umum	3	400.000
	- Pengemudi	2	350.000
	- Caraka	1	250.000
	- Verifikator	5	500.000
	- Pelaksana Teknis Ijin	3	400.000
	- Front Office/Pramu Kantor	3	400.000
	- Penelaah Peraturan	4	450.000
	- Penyusun Bahan Kerjasama	3	400.000
	- Pengolah Bahan Promosi	3	400.000
	- Penyusun Bahan Pengendalian	3	400.000
	- Pengadministrasi Data Perizinan	3	400.000
	- Pengadministrasi Keuangan	3	400.000
	- Petugas Lapangan	4	450.000
	- Pembuat SKRD	3	400.000
<b>9</b>	<b>KANTOR KESBANGPOL</b>		
	- Perencana Program dan Penyusun Laporan	5	500.000
	- Verifikator	5	500.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	4	450.000
	- Operator Komputer	3	400.000
	- Pengadministrasi Kepegawaian	3	400.000
	- Pengadministrasi Keuangan	3	400.000
	- Pengadministrasi Umum	3	400.000
	- Pengemudi	2	350.000
	- Caraka	1	250.000
	- Petugas Monitoring & Evaluasi Seksi	4	450.000
	- Pengadministrasi Perijinan / Pemroses Izin Keramaian	3	400.000
<b>10</b>	<b>KANTOR KETAHANAN PANGAN</b>		
	- Perencana Program dan Penyusun Laporan	5	500.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	4	450.000
	- Operator Komputer	3	400.000
	- Pengadministrasi Kepegawaian	3	400.000
	- Pengadministrasi Keuangan	3	400.000
	- Pengadministrasi Umum	3	400.000
	- Pengemudi	2	350.000
	- Caraka	1	250.000
	- Surveyor	4	450.000
<b>11</b>	<b>KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN, DAN DOKUMENTASI</b>		
	- Perencana Program dan Penyusun Laporan	5	500.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	4	450.000
	- Pengadministrasi Keuangan	3	400.000
	- Operator Komputer	3	400.000
	- Pengadministrasi Kepegawaian	3	400.000
	- Pengadministrasi Umum	2	350.000
	- Pengemudi	2	350.000
	- Caraka	1	250.000
	- Petugas Pelayanan Perpustakaan	2	350.000
	- Petugas Teknis Perpustakaan	3	400.000
	- Pengelola Media Elektronik	3	400.000
	- Jabatan Fungsional Tertentu		
	- Arsiparis	5	500.000

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
	- Pustakawan	5	500.000
<b>12</b>	<b>RSUD</b>		
	- Perencana Program dan Penyusun Pelaporan	5	500.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	4	450.000
	- Operator Komputer	3	400.000
	- Pengadministrasi Kepegawaian	3	400.000
	- Pengadministrasi Keuangan	3	400.000
	- Pengadministrasi Umum	2	350.000
	- Pengemudi	2	350.000
	- Caraka	1	250.000
	- Sespri Direktur RSUD	3	400.000
	- Pengolah Data Pelayanan Medis	3	400.000
	- Administrastor Kesehatan	3	400.000
	- Pengadministrasi Umum	2	350.000
	- Petugas Loker	2	350.000
	- Perekam Medis	2	350.000
	- Duty Manager	4	450.000
	<b>Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu</b>		
	- Dokter Umum	9	1.000.000
	- Dokter Gigi	9	1.000.000
	- Dokter Spesialis	10	1.000.000
	- Perawat	4	450.000
	- Bidan	4	450.000
	- Asisten Psikolog	3	400.000
	- Refraksionis Optision ( RO )	3	400.000
	- Perawat Gigi	3	400.000
	- Tekniker Gigi	3	400.000
	- Ortotis Prostetis	3	400.000
	- Fisioterapis	3	400.000
	- Akupuntur	3	400.000
	- Terapis Wicara	3	400.000
	- Okupasi Terapis	3	400.000
	- Kepala Instalasi CSSD ( Perawat )	3	400.000
	- Petugas Sterilisasi	2	350.000
	- Juru Cuci	1	250.000
	- Helper	2	350.000
	- Koordinator Ruang Bank Darah	2	350.000
	- Petugas PMI	2	350.000
	- Teknisi Transfusi	3	400.000
	- Pengurus Jenazah	2	350.000
	- Sanitarian	3	400.000
	- Petugas Sampah Medis	2	350.000
	- Teknisi Listrik	3	400.000
	- Teknisi Bangunan	3	400.000
	- Teknisi Air	3	400.000
	- Teknisi AC	3	400.000
	- Teknisi Elektromedik	3	400.000
	- Nutrisionis	3	400.000
	- Dietisien	3	400.000
	- Juru Masak	1	250.000
	- Pramu Saji	1	250.000
	- Juru Cuci	1	250.000
	- Apoteker	4	450.000

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
	- Asisten Apoteker	3	400.000
	- Pengadministrasi Umum	2	350.000
	- Pengentri Obat Askes	3	400.000
	- Pengantar Barang	2	350.000
	- Pranata Laboratorium Kesehatan	3	400.000
	- Radiografer	3	400.000
	- Pencuci Foto Rontgen	3	400.000
<b>13</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>		
	- Perencana Program dan Penyusun Laporan	5	500.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	4	450.000
	- Operator Komputer	3	400.000
	- Pengadministrasi Kepegawalan	4	450.000
	- Pengadministrasi Keuangan	4	450.000
	- Pengadministrasi Umum	4	450.000
	- Pengemudi	2	350.000
	- Caraka	1	250.000
	- Pengolah NISN dan NUPTK	5	500.000
	- Pengadministrasi Data	4	450.000
	- Pengentri RKA dan DPA	4	450.000
	- Pengolah Laporan Fisik	5	500.000
	- Pengolah Data Sertifikasi	5	500.000
	- Pengolah Data Kualifikasi	5	500.000
	- Verifikator Sarana dan Prasarana	5	500.000
	- Pengelola Kurikulum	4	450.000
	- Pengelola Database Guru	4	450.000
	- Pengelola Paket A, B, C	4	450.000
	- Pengelola PKBM	4	450.000
	- Pengelola Kegiatan	4	450.000
	<b>Kelompok Jabatan Fungsional Pada UPT</b>		
	- Pengadministrasi Umum UPTD	3	400.000
	- Pengadministrasi Umum SKB	3	400.000
	- Pengadministrasi Umum Sekolah Menengah	3	400.000
<b>14</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>		
	- Perencana Program dan Penyusun Laporan	5	500.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	4	450.000
	- Operator Komputer	3	400.000
	- Petugas Rekam Medik	3	400.000
	- Pengadministrasi Kepegawalan	3	400.000
	- Pengadministrasi Keuangan	3	400.000
	- Pengadministrasi Umum	2	350.000
	- Pengemudi	2	350.000
	- Petugas Keamanan / Sekuriti	2	350.000
	- Caraka	1	250.000
	<b>Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu</b>		
	- Dokter Umum	9	1.000.000
	- Perawat	4	450.000
	- Bidan	4	450.000
	- Juru Imunisasi	3	400.000
	- Dokter Gigi	9	1.000.000
	- Perawat Gigi	3	400.000
	- Pembantu Rawat Gigi	3	400.000
	- Apoteker	4	450.000
	- Asisten Apoteker	3	400.000

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
	- Pranata Laboratorium Kesehatan	3	400.000
	- Nutritionis	3	400.000
	- Sanitarian	3	400.000
<b>15</b>	<b>DISOSNAKER</b>		
	- Perencana Program dan Penyusun Laporan	5	500.000
	- Pengawas Ketenagakerjaan & Keselamatan serta Kesehatan Kerja	5	500.000
	- Mediator Hubungan Industrial	5	500.000
	- Petugas Antar Kerja	5	500.000
	- Petugas Pelayanan & Rehabilitasi Sosial	5	500.000
	- Pemandu dan Pembimbing Kesos	5	500.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	5	500.000
	- Operator Komputer	4	450.000
	- Pengadministrasi Kepegawaian	3	400.000
	- Pengadministrasi Keuangan	4	450.000
	- Pengadministrasi Umum	2	350.000
	- Pengemudi	2	350.000
	- Caraka	1	250.000
	<b>Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu</b>		
	- Pengawas Tenaga Kerja	5	500.000
	- Perantara Hubungan Industrial	5	500.000
<b>16</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>		
	- Perencana Program dan Penyusun Laporan	5	500.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	4	450.000
	- Operator Komputer	3	400.000
	- Pengadministrasi Kepegawaian	3	400.000
	- Pengadministrasi Keuangan	3	400.000
	- Pengadministrasi Umum	2	350.000
	- Pengemudi	2	350.000
	- Caraka	2	350.000
	- Petugas Entri Data	4	450.000
	- Operator Komputer / Operator SIAK	4	450.000
	- Teknisi Komputer dan Jaringan	4	450.000
	- Pengadministrasi dan Verifikator Akta	3	400.000
	- Pengetik Akta	3	400.000
	- Petugas Front Office dan Agendaris	3	400.000
<b>17</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA</b>		
	- Perencana Program dan Penyusun Laporan	5	500.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	4	450.000
	- Pengadministrasi Keuangan	3	400.000
	- Operator Komputer	3	400.000
	- Pengadministrasi Kepegawaian	3	400.000
	- Pengadministrasi Umum	2	350.000
	- Pengemudi	2	350.000
	- Caraka	2	350.000
	- Petugas Layanan Front Office/Pramu Tamu	2	350.000
	- Petugas Patroli Jalan Raya	3	400.000
	- Petugas Lapangan	3	400.000
	- Juru Pungut Retribusi	3	400.000
	- Penguji Kendaraan Bermotor	3	400.000
<b>18</b>	<b>DINAS PU</b>		
	- Perencana dan Penyusun Program	5	500.000
	- Pengolah Data dan Penyusun Laporan Ke-PU-an	4	450.000

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
	- Pengawas Jalan, Jembatan dan Peralatan serta Perbekalan	5	500.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	4	450.000
	- Operator Komputer	3	400.000
	- Pengadministrasi Kepegawaian	3	400.000
	- Pengadministrasi Keuangan	3	400.000
	- Pengadministrasi Umum	3	400.000
	- Pengemudi	2	350.000
	- Caraka	2	350.000
	- Surveyor	3	400.000
	- Operator Alat Berat	3	400.000
<b>19</b>	<b>DINAS TATA RUANG, TATA BANGUNAN, DAN PERUMAHAN</b>		
	- Perencana Program dan Penyusun Laporan	5	500.000
	- Pengawas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan	5	500.000
	- Pengolah data dan Pemroses Data/Peta digital	5	500.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	5	500.000
	- Operator Komputer	3	400.000
	- Pengadministrasi Kepegawaian	3	400.000
	- Pengadministrasi Keuangan	3	400.000
	- Pengadministrasi Umum	3	400.000
	- Agendaris	2	350.000
	- Pengemudi	2	350.000
	- Caraka	2	350.000
	- Surveyor / Petugas Lapangan Kecamatan / Teknis Pengukuran	4	450.000
	- Pelaksana teknis KRK-PRK	4	450.000
	- Pelaksana teknis IMB	4	450.000
	- Pelaksana teknis KRK-Lingkungan	4	450.000
<b>20</b>	<b>DINAS KOPERASI DAN UMKM</b>		
	- Perencana Program dan Penyusun Laporan	5	500.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data Kelembagaan Koperasi	4	450.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data Pengembangan Organisasi dan Tata	4	450.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	4	450.000
	- Fasilitator Pemodalan dan Simpan Pinjam	3	400.000
	- Fasilitator Pengembangan Usaha Koperasi dan UKM	3	400.000
	- Operator Komputer	3	400.000
	- Pengadministrasi Kepegawaian	3	400.000
	- Pengadministrasi Umum	3	400.000
	- Pengemudi	3	400.000
	- Caraka	2	350.000
<b>21</b>	<b>DINAS PERINDAGTAMBAH</b>		
	- Perencana Program dan Penyusun Laporan	5	500.000
	- Fasilitator/Petugas Pembimbing Usaha dan Kemitraan	4	450.000
	- Petugas Pelaksana Pembinaan dan Perlindungan Konsumen	4	450.000
	- Petugas Pengawas Barang dan Jasa serta Pertambangan	4	450.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	4	450.000
	- Operator Komputer	3	400.000
	- Pengadministrasi Kepegawaian	2	350.000
	- Pengadministrasi Keuangan	2	350.000
	- Pengadministrasi Umum	2	350.000
	- Pengemudi	2	350.000
	- Agendaris	2	350.000
	- Caraka	1	250.000
<b>22</b>	<b>DISPORA</b>		
	- Perencana Program dan Penyusun Laporan	5	500.000

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
	- Pengumpul dan Pengolah Data	4	450.000
	- Operator Komputer	3	400.000
	- Pengadministrasi Kepegawaian	3	400.000
	- Pengadministrasi Keuangan	3	400.000
	- Pengadministrasi Umum	2	350.000
	- Pengemudi	2	350.000
	- Caraka	1	250.000
	- Petugas Portir	2	350.000
	- Petugas Penitipan	2	350.000
	- Petugas Persewaan	2	350.000
	- Petugas SAR	2	350.000
	- Petugas Pertengkapan / OB	2	350.000
<b>23</b>	<b>DPKA</b>		
	- Perencana Program dan Penyusun Laporan	6	550.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data (Pengamanan Aset)	5	500.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data (Penilaian, Penghapusan, dan	5	500.000
	- Operator Komputer (Sistem Informasi)	5	500.000
	- Pengadministrasi Kepegawaian	5	500.000
	- Pengadministrasi Umum	5	500.000
	- Pengemudi	5	500.000
	- Caraka	5	500.000
	- Juru Pungut dan Pengalihan	5	500.000
	- TP PBB Kecamatan		-
	- Bendahara Penerimaan PPKD	6	550.000
	- Verifikator+Pembantu Bendahara Pengeluaran	6	550.000
	- Verifikator	6	550.000
	- Verifikator Gaji	6	550.000
	- Verifikator SKPP dan Potongan Gaji	6	550.000
	- Penyaji Laporan	5	500.000
<b>24</b>	<b>DISPERNAKBUNHUT</b>		
	- Perencana Program dan Penyusun Laporan	5	500.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	4	450.000
	- Operator Komputer	3	400.000
	- Pengadministrasi Kepegawaian	3	400.000
	- Pengadministrasi Keuangan	3	400.000
	- Pengadministrasi Umum	2	350.000
	- Pengemudi	2	350.000
	- Penganalisa Data Budidaya Tanaman Pangan	4	450.000
	- Penganalisis Penyakit Hewan	4	450.000
	- Penganalisis Hama Dan Penyakit Tanaman	4	450.000
	- Pelaksana Penerapan Budidaya Hortikultura	4	450.000
	- Pengawas	4	450.000
	- Surveyor / Petugas Lapangan / Penyuluh / Polisi Hutan	5	500.000
	- Caraka	2	350.000
<b>25</b>	<b>DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>		
	- Perencana Program dan Penyusun Laporan	5	500.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	4	450.000
	- Pengadministrasi Keuangan	3	400.000
	- Operator Komputer	3	400.000
	- Pengadministrasi Kepegawaian	3	400.000
	- Pengadministrasi Umum	2	350.000
	- Agendaris	2	350.000

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
	- Petugas Loker	2	350.000
	- Pengawas dan Pemelihara sarana dan prasarana	5	500.000
	- Pengemudi	2	350.000
	- Caraka	2	350.000
<b>26</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		
	- Perencana Program dan Penyusunan Laporan	5	500.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	4	450.000
	- Pengadministrasi Keuangan (Bendahara, dll)	3	400.000
	- Petugas Pengawas	3	400.000
	- Operator Komputer	3	400.000
	- Pengadministrasi Kepegawaian	3	400.000
	- Pengadministrasi Umum	2	350.000
	- Pengemudi	2	350.000
	- Caraka	2	350.000
	- Petugas Penagihan	2	350.000
	- Nahkoda Kapal	4	450.000
	- Jabatan Fungsional Khusus		-
	- Penyuluh Perikanan Pertama	5	500.000
	- Penyuluh Perikanan Penyelia	5	500.000
	- Penyuluh Perikanan Madya	5	500.000
<b>27</b>	<b>DKP</b>		
	- Perencana Program dan Penyusun Laporan	5	500.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	5	500.000
	- Operator Komputer	2	350.000
	- Pengadministrasi Kepegawaian	2	350.000
	- Pengadministrasi Umum	2	350.000
	- Pengemudi	2	350.000
	- Caraka	2	350.000
	- Resepsionis	2	350.000
	- Pengawas Taman	3	400.000
	- Pengawas Lapangan TPA	3	400.000
	- Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	3	400.000
	- Pengawas Penyapuan	3	400.000
	- Teknis Angkutan Sampah	2	350.000
	- Pengemudi Angkutan Sampah	2	350.000
	- Petugas Bongkar Muat Angkutan Sampah	2	350.000
	- Petugas Pertamanan	2	350.000
	- Petugas Kebersihan	2	350.000
	- Petugas Penyiraman	2	350.000
	- Petugas Pengeprasan Pohon	2	350.000
	- Petugas Teknis Keindahan	2	350.000
	- Petugas Penagihan	2	350.000
	- Korlap Pemeliharaan Taman	2	350.000
<b>28</b>	<b>DINAS PASAR</b>		
	- Perencana Program dan Penyusun Laporan	5	500.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	4	450.000
	- Operator Komputer	3	400.000
	- Pengadministrasi Kepegawaian	3	400.000
	- Pengadministrasi Keuangan	3	400.000
	- Pengadministrasi Umum	2	350.000
	- Pengemudi	2	350.000
	- Caraka	2	350.000
	- Petugas Kebersihan Pasar	2	350.000

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
	- Petugas Penagihan/retribusi	2	350.000
<b>29</b>	<b>BPBD dan PEMADAM KEBAKARAN</b>		
	- Perencana Program dan Penyusun Laporan	5	500.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	4	450.000
	- Operator Komputer	3	400.000
	- Pengadministrasi Kepegawain	3	400.000
	- Pengadministrasi Keuangan	3	400.000
	- Pengadministrasi Umum	3	400.000
	- Pengemudi	2	350.000
	- Caraka	2	350.000
	- Petugas Penagihan	2	350.000
	- Operasional Pusat Pengendalian	4	450.000
	- Rescue	4	450.000
	- Operator Speed Boat/perahu karet	3	400.000
	- Petugas Lapangan	4	450.000
	- Operasional Gedung	4	450.000
	- Petugas Pemadam Kebakaran	4	450.000
	- Pengemudi Kendaraan Rescue	3	400.000
	- Penata Usaha Rumah Tangga	3	400.000
	- Pengevaluasi dan Pelaporan	4	450.000
	- Pengelola Barang Distribusi Kebutuhan Dasar Bencana	3	400.000
	- Pengelola Barang Distribusi Bantuan Perbaikan	3	400.000
	- Pengelola Barang Logistik Peralatan Kebencanaan	3	400.000
	- Operator Alat Deteksi Bencana	3	400.000
	- Pengidentifikasi Kejadian Bencana	3	400.000
	- Petugas Evakuasi Korban Bencana	3	400.000
	- Penyusun Kebijakan Penanggulangan Bencana	5	500.000
	- Pengelola Sistem Informasi Bencana	4	450.000
	- Perencana Pembangunan Ramah Lingkungan	4	450.000
	- Penganalisis Kesiapsiagaan Bencana	5	500.000
	- Penyusun Kebijakan Kesiapsiagaan Bencana	5	500.000
	- Perencana Pembangunan Areal Evakuasi	5	500.000
	- Pengadministrasi Pelayanan Korban Bencana	3	400.000
	- Penganalisis Informasi Kejadian Bencana	5	500.000
	- Perencana Pemulihan Sarana dan Prasarana Vital	5	500.000
	- Pengadministrasi Laporan Kejadian Bencana	3	400.000
	- Pengevaluasi dan Monitoring Rehabilitasi	5	500.000
	- Pengadministrasi Data Kerusakan Infrastruktur	3	400.000
	- Penganalisis Rekonstruksi Infrastruktur	5	500.000
	- Penyusun Kebijakan Bangunan Ramah Bencana	5	500.000
	- Petugas Sosialisasi Bencana	3	400.000
	- Operator Mesin Chainsaw	3	400.000
	- Pramu Kantor	2	350.000
<b>30</b>	<b>SATPOL PP</b>		
	<b>A. Jabatan Fungsional Umum Administrasi</b>		
	- Perencana Program dan Penyusun Laporan	5	500.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	4	450.000
	- Operator Komputer	3	400.000
	- Pengadministrasi Keuangan	3	400.000
	- Pengadministrasi Kepegawain	3	400.000
	- Petugas Humas	3	400.000
	- Pengadministrasian Perlengkapan	3	400.000
	- Pengadministrasi Umum	2	350.000



No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
	- Caraka	2	350.000
	<b>B. Jabatan Fungsional Umum Operasional Lapangan</b>		
	<b>1. Pleton Praja Wibawa</b>		
	- Komandan Pleton	3	400.000
	- Komandan Regu	2	350.000
	- Anggota	1	250.000
	<b>2. Pos pengamanan Kantor/Rumah Dinas</b>		
	- Koordinator	2	350.000
	- Anggota	1	250.000
	<b>3. PAM</b>		
	- Komandan Pleton	3	400.000
	- Komandan Regu	2	350.000
	- Anggota	1	250.000
	<b>3. PKD (Provost)</b>		
	- Koordinator	3	400.000
	- Wakil Koordinator	2	350.000
	- Anggota	1	250.000
	<b>4. PPNS</b>		
	- Koordinator	3	400.000
	- Anggota	2	350.000
	- Pembantu Penyidik	1	250.000
	<b>5. Informan/Pengamanan Tertutup</b>		-
	- Koordinator	3	400.000
	- Anggota	1	250.000
	<b>6. Pleton Kawal Kota (PATKO)</b>		-
	- Komandan Pleton	3	400.000
	- Komandan Regu	2	350.000
	- Anggota	1	250.000
	<b>7. Pengemudi Patroli dan Angkutan</b>	1	250.000
	<b>8. Operator Radio/Sandi</b>	1	250.000
<b>31. KANTOR KECAMATAN</b>			
	<b>- KECAMATAN</b>		
	- Perencana Program	5	400.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	4	350.000
	- Operator Komputer	3	350.000
	- Pengadministrasi Kepegawaian	3	350.000
	- Pengadministrasi Umum	3	300.000
	- Pengemudi	2	250.000
	- Caraka	2	250.000
	- Petugas Lapangan	2	250.000
	- Front Office	2	250.000
	<b>- KELURAHAN</b>		
	- Pengumpul dan Pengolah Data	3	300.000
	- Operator Komputer	3	300.000

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
	- Pengadministrasi Kepegawaian	2	250.000
	- Pengadministrasi Umum	2	250.000
	- Caraka	1	200.000
	- Petugas Lapangan	1	200.000
	- Front Office	1	200.000
<b>32</b>	<b>SEKRETARIAT KORPRI</b>		
	- Perencana Program dan Penyusun Laporan		-
	- Pengumpul dan Pengolah Data		-
	- Operator Komputer		-
	- Pengadministrasi Kepegawaian		-
	- Pengadministrasi Umum	2	350.000
	- Pengemudi		-
	- Caraka		-
<b>33</b>	<b>PNS AKTIF PADA INSTITUSI LAIN (KPU)</b>		
	- Pengumpul dan Pengolah Data		-
	- Operator Komputer		-
	- Pengadministrasi Umum		-

WALIKOTA PADANG

  
FAUZI BAHAR

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS**

No.	Lokasi Tempat Bertugas	Besaran Tambahan Penghasilan
1	Kecamatan Bungus Teluk Kabung	
	a. Guru dan UPT Dinas Pendidikan	200.000
	b. PNS di Kecamatan Bungus Teluk Kabung	200.000
2	Kelurahan Sungai Pisang Kecamatan bungus teluk Kabung	
	a. Guru dan UPT Dinas Pendidikan	500.000
	b. PNS di Kelurahan Sungai pisang	500.000
3	PNS dan PTT Dinas Kesehatan	
	Dokter Puskesmas Pembantu	
	a. Kelurahan Sungai Pisang Kecamatan Bungus Teluk Kabung	500.000
	b. Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan	500.000
	c. Kelurahan Baringin Kecamatan Lubuk Kilangan	500.000
	d. Kelurahan Air Manis Kecamatan Padang Selatan	500.000
	e. Kelurahan Batu Busuk Kecamatan Pauh	500.000
	PTT Puskesmas pembantu	
	a. Kelurahan Sungai Pisang Kecamatan Bungus Teluk Kabung	250.000
	b. Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan	250.000
	c. Kelurahan Baringin Kecamatan Lubuk Kilangan	250.000
	d. Kelurahan Air Manis Kecamatan Padang Selatan	250.000
	e. Kelurahan Batu Busuk Kecamatan Pauh	250.000

WALIKOTA PADANG


  
FAUZI BAHAR

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA**

No.	Berdasarkan Kondisi Kerja	Besaran Tambahan Penghasilan
1	Satuan Polisi Pamong Praja	
	a. Satuan Polisi Pamong Praja	450.000
3	BPBDPK	
	a. BPBD dan Pemadam Kebakaran	450.000

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAKAR

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 38 TAHUN 2012

TANGGAL : 28 DESEMBER 2012

**SURAT KETERANGAN**

**NOMOR : .....**

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Unit Organisasi :

Dengan ini menerangkan bahwa Pegawai :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Unit Organisasi :

.....  
Telah tidak berada di tempat tugas tanpa alasan yang sah/tanpa izin pada hari....., tanggal....., antara pukul.....s/d.....

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
(atasan Langsung)

.....  
NIP.....

Tembusan :

1.

2.

WALIKOTA PADANG

  
FAUZI/BAHAR

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 32 TAHUN 2012

TANGGAL : 28 DESEMBER 2012

**PERMOHONAN IZIN/PEMBERITAHUAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Organisasi :

Dengan ini mengajukan permohonan izin untuk tidak masuk bekerja/izin pulang sebelum waktunya/pemberitahuan terlambat masuk bekerja.....

Selama.....hari/jam/menit, pada hari.....tanggal.....

Karena alasan penting yaitu.....

Demikian disampaikan kiranya menjadi maklum.

Menyetujui/Tidak Menyetujui

.....

.....  
NIP.....

Hormat kami

.....

.....  
NIP.....

WALIKOTA PADANG

  
FAUZI BAHAR

**PERSENTASE PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK BEKERJA**

TINGKAT KETERLAMBATAN (TL)	WAKTU KETERLAMBATAN	PERSENTASE PEMOTONGAN
TL 1	07.31 s/d < 08.00 (keterlambatan 1 s/d 30 menit setelah waktu masuk kerja)	0,5 %
TL 2	08.01 s/d < 08.30 (keterlambatan 31 s/d 60 menit setelah waktu masuk kerja)	1 %
TL 3	08.31 s/d < 09.00 (keterlambatan 61 s/d 90 menit setelah waktu masuk kerja)	1,25 %
TL 4	≥ 09.01 dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja (keterlambatan lebih dari 91 menit setelah waktu masuk kerja)	2,5 %

WALIKOTA PADANG

  
FAUZI BAHAR

**PERSENTASE PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI YANG PULANG SEBELUM WAKTUNYA**

**Hari : Senin s/d Kamis**

TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	WAKTU PULANG BEKERJA	PERSENTASE PEMOTONGAN
PSW 1	15.31 s/d < 16.00 (1 s/d 30 menit lebih awal dari waktu pulang kerja)	0,5 %
PSW 2	15.01 s/d < 15.30 (31 s/d 60 menit lebih awal dari waktu pulang kerja)	1 %
PSW 3	14.31 s/d < 15.00 (61 s/d 90 menit lebih awal dari waktu pulang kerja)	1,25 %
PSW 4	< 14.30 dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja (91 menit atau lebih dari waktu pulang kerja yang telah ditentukan)	2,5 %

**Hari : Jumat**

TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	WAKTU PULANG BEKERJA	PERSENTASE PEMOTONGAN
PSW 1	16.01 s/d < 16.30 (1 s/d 30 menit lebih awal dari waktu pulang kerja)	0,5 %
PSW 2	15.31 s/d < 16.01 (31 s/d 60 menit lebih awal dari waktu pulang kerja)	1 %
PSW 3	15.01 s/d < 15.31 (61 s/d 90 menit lebih awal dari waktu pulang kerja)	1,25 %
PSW 4	< 15.01 dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja (91 menit atau lebih dari waktu pulang kerja yang telah ditentukan)	2,5 %

WALIKOTA PADANG


  
FAUZI BAHAR